

# PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, UKURAN PEMERINTAH DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2018)

Muhammad Arifin<sup>1)</sup>, Ethika<sup>2)</sup>, Popi Fauziati<sup>3)</sup>

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bung Hatta

Email : [m.arifinubh@gmail.com](mailto:m.arifinubh@gmail.com) [ethika@bunghatta.ac.id](mailto:ethika@bunghatta.ac.id) [popifauziati@bunghatta.ac.id](mailto:popifauziati@bunghatta.ac.id)

## PENDAHULUAN

Kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi suatu hal yang penting bagi pemerintah daerah dan pihak eksternal. Data pengukuran kinerja keuangan yang bersumber dari informasi finansial yang diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat, dapat menjadi peningkatan program selanjutnya demi menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik dan berkualitas (Sari, 2016).

Suatu daerah dapat dikatakan sebagai daerah otonomi yaitu dapat dilihat dari kemampuan keuangan daerah. Kemampuan keuangan daerah yakni masing masing daerah otonom harus dapat mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat dengan terus melakukan usaha untuk mencari dan meningkatkan sumber keuangan yang ada di daerahnya. Pemerintah dituntut untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan berdasarkan sistem pengendalian intern yang baik. Pernyataan ini sesuai dengan Permendagri No. 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

## METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah teknik *sampling* jenuh, dimana semua populasi dijadikan sampel. Data sampel diperoleh dari 19 Kabupaten/Kota, yang terdiri dari 12 Kabupaten dan 7 Kota di Sumatera Barat. Penelitian ini memiliki rentang waktu 5 tahun dimulai dari tahun 2014-2018.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data berasal dari dokumen laporan realisasi APBD yang diperoleh dari Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Alat uji data yang digunakan adalah uji asumsi klasik sedangkan untuk menguji hipotesis digunakan regresi linier berganda dengan menggunakan *Cronbach Alpha* 5%.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil pengolahan data diperoleh ringkasan hasil seperti pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Regresi Linier Berganda. Rasio Efektivitas

Keterangan	B	T	Signifikan	$\alpha$	Kesimpulan
Constant	118,78	10,06	0,000	-	
PAD	15,42	2,97	0,004	0,05	Diterima
UPD	-0,136	-0,401	0,689	0,05	Ditolak
DP	0,002	0,609	0,544	0,05	Ditolak

Sumber: Hasil Pengolahan Data Menggunakan SPSS 16.0

Dari hasil analisis pada tabel.1 di atas dapat diperoleh nilai koefisien regresi linear berganda dari rasio efektivitas sebagai berikut:

$$KKPD = 118,784 + 15,420 \text{ PAD} - 0,136 \text{ UPD} + 0,002 \text{ DP}$$

PAD memiliki nilai signifikan  $0,004 < 0,05$ , maka keputusannya (H1) diterima. Sehingga dapat disimpulkan PAD berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil penelitian ini mendukung Yanto (2015), Sari (2016), Sari dan Mustanda (2019) yang menunjukkan bahwa PAD berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Ukuran Pemerintah Daerah memiliki nilai signifikan  $0,689 > 0,05$ , maka keputusannya (H2) ditolak. Sehingga dapat disimpulkan Ukuran Pemerintah Daerah tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Sari (2016), Sari dan Mustanda (2019) yang menjelaskan

bahwa Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Dana Perimbangan memiliki nilai signifikan  $0,544 > 0,05$ , maka keputusannya (H3) ditolak. Sehingga dapat disimpulkan Dana Perimbangan tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Yanto (2015) dan Sari (2016) yang menyatakan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Tabel 2. Regresi Linier Berganda. Rasio Ketergantungan

Keterangan	B	T	Signifikan	Alpha	Kesimpulan
Constant	75,286	12,995	0,000	-	
PAD	-1,995	-0,784	0,435	0,05	Ditolak
UPD	-0,329	-1,978	0,051	0,05	Ditolak
DP	0,004	1,842	0,069	0,05	Ditolak

Sumber: Hasil Pengolahan Data Menggunakan SPSS 16.0

Dari hasil analisis pada tabel.2 di atas dapat diperoleh nilai koefisien regresi linear berganda dari rasio ketergantungan sebagai berikut:

$$KKPD = 75,286 - 1,995 \text{ PAD} - 0,329 \text{ UPD} + 0,004 \text{ DP}$$

PAD memiliki nilai signifikan  $0,435 > 0,05$ , maka keputusannya (H1) ditolak. Sehingga dapat disimpulkan PAD tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan dengan hasil penelitian Yanto, (2015), Sari (2016), Sari dan Mustanda (2019) yang menunjukkan bahwa PAD berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Ukuran Pemerintah Daerah memiliki nilai signifikan  $0,051 > 0,05$ , maka keputusannya (H2) ditolak. Sehingga dapat disimpulkan Ukuran Pemerintah Daerah tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian Sari (2016), Sari dan Mustanda (2019) yang menjelaskan bahwa Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Dana Perimbangan memiliki nilai signifikan  $0,069 > 0,05$ , maka keputusannya (H3) ditolak. Sehingga dapat disimpulkan Dana Perimbangan tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Yanto (2015) dan Sari (2016) yang menyatakan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

PAD berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah berdasarkan rasio efektivitas. Tetapi berdasarkan rasio ketergantungan, PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Ukuran Pemerintah Daerah tidak berpengaruh signifikan berdasarkan rasio efektivitas maupun Berdasarkan rasio ketergantungan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Dana Perimbangan tidak berpengaruh signifikan berdasarkan rasio efektivitas maupun berdasarkan rasio ketergantungan, terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2008 *Tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.*
- [2] Sari, Indah Puspa. 2016. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, PAD, Leverage, Dana Perimbangan dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Kab/Kota Pulau Sumatera). *JOM Fekon Vol.3 No.1 hal.679-692, Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia.*
- [3] Sari, Ni Made Diah Permata dan I Ketut Mustanda. 2019. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manajemen, Vol.8, No. 8, 2019 :4759-4787, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bali, Indonesia.*
- [4] Yanto, Febri Ferta. 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sumatera Barat. *Skripsi Fakultas Ekonomi, Universitas Bung Hatta.*